



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 13 Maret 2019/Periodik - 2018)

BIDANG : YUDIKATIF
LEMBAGA : MAHKAMAH KONSTITUSI
UNIT KERJA : SEKRETARIAT JENDERAL
SUB UNIT KERJA : PUSAT PENELITIAN DAN PENGKAJIAN PERKARA, PENGELOLAAN
TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI

I. DATA PRIBADI

1. Nama : YUNI SANDRAWATI
2. Jabatan : KEPALA BIDANG PENELITIAN, PENGKAJIAN PERKARA DAN PERPUSTAKAAN
3. NHK : 139796

II. DATA HARTA**A. TANAH DAN BANGUNAN**

Rp. 2.715.400.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 65 m2/128 m2 di BEKASI, HASIL SENDIRI Rp. 850.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 144 m2/177 m2 di BEKASI, HASIL SENDIRI Rp. 1.450.000.000
3. Tanah Seluas 70 m2 di BEKASI, HASIL SENDIRI Rp. 46.900.000
4. Tanah Seluas 301 m2 di BEKASI, HASIL SENDIRI Rp. 201.670.000
5. Tanah Seluas 249 m2 di BEKASI, HASIL SENDIRI Rp. 166.830.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN

Rp. 192.000.000

1. MOTOR, HONDA SEPEDA MOTOR Tahun 2014, HASIL SENDIRI Rp. 10.000.000
2. MOBIL, HONDA BR-V MINIBUS Tahun 2016, HASIL SENDIRI Rp. 182.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA

Rp. 65.725.000

D. SURAT BERHARGA

Rp. 34.747.645

E. KAS DAN SETARA KAS

Rp. 178.714.661

F. HARTA LAINNYA

Rp. ----

Sub Total

Rp. 3.186.587.306

III. HUTANG

Rp. 413.000.000

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)

Rp. 2.773.587.306

Catatan:



1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini diumumkan dengan catatan **LENGKAP** berdasarkan hasil verifikasi tanggal **20 Juni 2019**.
4. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.